

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab Bandung Tahun 2017 - 2024

<sup>1</sup>Salwa Kamilah , <sup>2</sup>Wajib Ginting

<sup>1</sup>Akuntansi universitas Indonesia Membangun,Bandung

<sup>1</sup>Akuntansi universitas Indonesia Membangun,Bandung

E-mail: <sup>1</sup>salwakamilah@student.inaba.ac.id, <sup>2</sup>wajib.ginting@inaba.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung selama periode 2017 hingga 2024. Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan informasi sekunder yang diambil dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran, kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linier ganda dengan dukungan software SPSS. Kinerja keuangan dinilai melalui nilai rata-rata indikator seperti rasio kemandirian, produktivitas PAD, serta tingkat efisiensi, di mana pemeriksaan asumsi klasik memastikan distribusi data yang normal tanpa adanya masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, atau autokorelasi. Hasil dari pengujian t parsial mengungkapkan bahwa PAD memberikan dampak yang signifikan (dengan nilai Sig. 0,002), sementara DAU (Sig. 0,257) dan Belanja Modal (Sig. 0,077) tidak menunjukkan signifikansi; secara keseluruhan, ketiga variabel ini secara bersama-sama menghasilkan pengaruh yang bermakna (pengujian F Sig. 0,009) dengan koefisien determinasi mencapai 87,5%.

**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, kinerja keuangan daerah, Kabupaten Bandung*

### ABSTRACT

*This study examines the influence of Local Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Capital Expenditure on the financial performance of the Bandung Regency Regional Government from 2017 to 2024. The analysis utilizes secondary data from Budget Realization Reports, processed via multiple linear regression methods with the aid of SPSS software. Financial performance is assessed through average ratios of autonomy, PAD effectiveness, and efficiency levels, with classical assumption tests confirming normal data distribution, absence of multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. Partial t-test results reveal that PAD exerts a significant effect (Sig. 0.002), whereas DAU (Sig. 0.257) and Capital Expenditure (Sig. 0.077) are not significant; simultaneously, all three variables demonstrate a significant impact (F-test Sig. 0.009) with a determination coefficient of 87.5%.*

**Keywords:** *Local Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure, regional financial performance, Bandung Regency.*

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan mendorong perkembangan bangsa melalui pengaturan dana yang produktif, hemat, dan transparan. Desentralisasi keuangan memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menangani dan mengatur finansialnya sendiri berdasarkan potensi serta keperluan wilayahnya. Oleh karena itu, kesuksesan pelaksanaan pemerintahan lokal sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam menangani sumber pemasukan dan mendistribusikan dana secara tepat sasaran guna meningkatkan performa finansial.

Secara teoritis, Mahmudi (2019:59) menggambarkan kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pengaturan dana yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan ketepatan dalam memanfaatkan anggaran untuk mencapai target pembangunan. Ini menyiratkan bahwa daerah yang lebih mahir dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran akan memiliki performa finansial yang lebih superior.

Halim (2014:67) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup seluruh pendapatan lokal yang berasal dari sumber ekonomi asli wilayah, yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah. Dalam pandangan teori, meningkatnya PAD seharusnya mendorong perbaikan kinerja keuangan, karena daerah memperoleh lebih banyak kebebasan untuk mengatur penggunaan dana mereka sendiri.

Menurut Halim (2014:79), DAU adalah dana yang berasal dari penerimaan APBN yang disalurkan ke daerah dengan maksud menyamakan

kemampuan keuangan di antara berbagai wilayah untuk mendukung desentralisasi fiskal. Secara teoritis, naiknya DAU seharusnya dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan inisiatif Pembangunan

Halim (2016:103) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melampaui satu periode anggaran dan akan menambah harta tetap atau inventaris daerah. Dalam teori, peningkatan belanja modal seharusnya memberikan efek positif pada kinerja keuangan daerah karena dapat meningkatkan produktivitas serta pelayanan masyarakat.

Dari penjelasan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa performa finansial pemerintah lokal berkaitan erat dengan kemampuan wilayah dalam menangani sumber pemasukan dan pengeluaran secara produktif, hemat, serta transparan. Performa finansial berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk mengevaluasi seberapa jauh pemerintah daerah dapat mencapai otonomi fiskal dan melaksanakan tugas pemerintahan dengan maksimal. Di tengah sistem desentralisasi keuangan, keberhasilan pengaturan dana lokal menunjukkan tingkat keefektifan implementasi otonomi wilayah.

Berbagai faktor yang mempengaruhi performa finansial daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal. PAD mencerminkan sejauh mana pemerintah lokal mampu mengeksplorasi potensi ekonomi wilayah sebagai basis pendanaan independen. Di sisi lain, DAU adalah

bentuk bantuan fiskal dari pemerintah pusat untuk mengurangi disparitas keuangan antarwilayah, namun bisa menciptakan ketergantungan jika tidak dioptimalkan dengan baik. Sementara itu, Belanja Modal berperan krusial dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan masyarakat, karena merepresentasikan distribusi anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan aset wilayah yang bermanfaat dalam jangka waktu lama.

Meski demikian, peningkatan pada PAD, DAU, atau Belanja Modal tidak selalu paralel dengan perbaikan performa finansial. Dalam kenyataan, masih ada wilayah yang menampilkan performa keuangan rendah walaupun penerimaan dan pengeluaran mereka naik. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam pengaturan pemasukan, ketergantungan berlebihan pada transfer dana pusat, serta pemanfaatan Belanja Modal yang belum sepenuhnya mendukung produktivitas dan layanan publik.

Untuk mengukur seberapa besar kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, efektif, dan efisien, dibutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kondisi performa finansial dengan obyektif. Salah satu pendekatan yang umum diterapkan dalam studi akuntansi sektor publik adalah dengan menghitung nilai rata-rata dari tiga rasio pokok, yakni rasio otonomi keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Berdasarkan data realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung antara tahun 2017 hingga 2024, tampak bahwa Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal mengalami variasi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kecenderungan naik, mulai dari Rp936.905.730.680 pada 2017 hingga mencapai Rp1.385.838.716.205 pada 2024, atau bertambah sekitar 47,9% dalam kurun waktu delapan tahun itu. Di lain pihak, Dana Alokasi Umum (DAU) juga naik dari Rp2.059.845.225.000 pada 2017 menjadi Rp2.391.193.713.000 pada 2024, atau meningkat kurang lebih 16,1%. Belanja Modal pun mengikuti pola serupa, naik dari Rp628.497.495.405 pada 2017 ke Rp1.052.280.611.840 pada 2024, atau bertambah sekitar 67,4%. Kenaikan pada ketiga elemen ini mencerminkan adanya penguatan kemampuan fiskal wilayah untuk mendanai aktivitas pembangunan dan layanan masyarakat.

Meski begitu, kenaikan angka PAD, DAU, dan Belanja Modal tersebut belum sepenuhnya disertai oleh perbaikan pada rasio performa finansial daerah. Rasio otonomi wilayah hanya sedikit naik dari 20,9% pada 2017 menjadi 22,8% pada 2024, yang masih dikategorikan sebagai rendah. Adapun rasio efektivitas menunjukkan penurunan yang cukup besar, dari 114,80% pada 2017 hingga hanya 86,2% pada 2024. Ini menandakan bahwa pencapaian PAD di tahun-tahun belakangan belum bisa memenuhi sasaran yang ditentukan. Rasio efisiensi juga berfluktuasi antara 14% sampai 22%, dengan nilai rata-rata sekitar 17%, yang menunjukkan tingkat efisiensi pengaturan dana yang cukup memadai namun belum maksimal.

Fenomena ini mengungkapkan bahwa walaupun kapasitas penerimaan wilayah mengalami pertumbuhan, hal itu belum seimbang dengan peningkatan produktivitas dan otonomi dalam pengelolaan dana. Kenaikan PAD dan DAU belum sepenuhnya memberikan sumbangan pada performa finansial yang lebih unggul, karena masih ada hambatan dalam pengoptimalan pemasukan serta efektivitas pemanfaatan anggaran, terutama di bidang belanja modal. Oleh sebab itu, kapasitas Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani keuangan daerah masih memerlukan peningkatan agar pertumbuhan pemasukan yang terjadi bisa selaras dengan perbaikan produktivitas dan efisiensi finansial secara menyeluruh.

## 2. LANDASAN TEORI

### Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasi, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan dan tunduk pada Standar Akuntansi Pemerintah. (peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)

### Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan didefinisikan sebagai "Laporan Realisasi Anggaran yang menampilkan ringkasan asal, pembagian, dan penggunaan dana yang diurus oleh pemerintah pusat atau daerah, serta menunjukkan perbandingan antara rencana anggaran dan pelaksanaannya selama satu masa pelaporan."

Fungsi pokok dari Laporan Realisasi Anggaran adalah menyediakan pandangan yang jernih tentang bagaimana anggaran pemerintah dijalankan, mencakup baik pencapaian aktual maupun sasaran yang sudah ditentukan.

### Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang membahas Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai berikut: "Pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah, dengan tujuan memberikan kelonggaran kepada daerah untuk mencari dana dalam menjalankan otonomi daerah sebagai manifestasi prinsip desentralisasi."

### Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Formula untuk menghitung pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.}$$

### Dana Alokasi Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai berikut:

"Dana yang berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang dibagikan dengan maksud menyamakan kapasitas finansial di antara berbagai daerah guna membiayai keperluan daerah sebagai bagian dari implementasi desentralisasi.”

#### **Indikator Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dirumuskan sebagai:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (Fiscal Gap)}$$

#### **Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 yang memberikan panduan tentang pengaturan keuangan daerah, belanja modal diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menyediakan, atau membangun harta tetap yang berbentuk fisik dan memberikan keuntungan selama lebih dari 12 bulan guna mendukung aktivitas pemerintah, termasuk contoh seperti lahan, alat dan mesin, bangunan serta gedung, jalan raya, sistem irigasi dan infrastruktur, serta harta tetap lainnya.

#### **Indikator Belanja Modal**

Adapun rumus menghitung belanja modal menurut Halim (2016:214) Adalah :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan & Mesin} + \text{Belanja Gedung & Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya.}$$

#### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja didefinisikan sebagai: “Keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.”

Evaluasi kinerja finansial pemerintah daerah dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengkaji dan merencanakan tindakan selanjutnya guna meningkatkan standar layanan publik secara signifikan.

#### **Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Ramli (2016:5), pengukuran kinerja didefinisikan sebagai: “Metode untuk menilai performa finansial daerah, di antaranya melalui penerapan indikator keuangan. Berbagai indikator yang dapat diterapkan meliputi rasio otonomi fiskal daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Perumbuhan.”

Kinerja finansial merupakan aktivitas rutin yang bertujuan menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mewujudkan target yang sudah ditentukan. Aktivitas ini mempertimbangkan elemen ketepatan penggunaan, keberhasilan, dan mutu output yang dihasilkan. Evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan berbagai indikator finansial seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian, serta pertumbuhan. Secara menyeluruh, indikator-indikator ini menggambarkan kapasitas wilayah dalam mengatur sumber daya ekonominya dengan maksimal.

#### **Indikator Rata - Rata Kinerja Keuangan**

Adapun rumus Rata-Rata

Rasio Kinerja keuangan dihitung dengan menggabungkan tiga indikator utama: kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Adalah Sebagai berikut:

$$RRKK = \frac{R \text{ Kemandirian} + R \text{ Efektivitas} + R \text{ Efisiensi}}{3}$$

### Hipotesis Penelitian

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal memberikan pengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2017 hingga 2024.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Operasional Variabel

Dalam suatu penelitian, terdapat sejumlah elemen yang perlu didefinisikan secara tepat sebelum memulai pengumpulan informasi. "Variabel penelitian merupakan suatu hal yang berbentuk apapun yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti sehingga diperoleh data tentang hal tersebut, kemudian disimpulkan." (Sugiyono,2019:57)

Elemen dalam kajian ini mencakup tiga variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Belanja Modal (X3), sedangkan variabel terikat adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

#### Teknik Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah data dari Laporan Realisasi Anggaran periode 2017-2024 di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Sampel diambil menggunakan teknik non-probability dengan pendekatan sampel jenuh, karena populasi relatif kecil, sehingga

seluruh laporan keuangan selama 8 tahun tersebut dijadikan sampel.

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diambil dari dokumen laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, dan data tersebut bisa diperoleh melalui akses daring di situs web ([www.ppid.bandungkab.go.id](http://www.ppid.bandungkab.go.id))

#### Metode Analisis Data

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan analisis statistik deskriptif dan verifikatif, dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Tahap pertama meliputi Uji asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Validitas diperiksa melalui korelasi Product Moment Pearson, di mana instrumen dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 5%. Kemudian, hipotesis dievaluasi menggunakan uji t untuk dampak parsial, uji F untuk dampak simultan, serta pemeriksaan koefisien determinasi..

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Analisis Deskriptif

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	
PAD	8	86.24	114.86	105.1088	9.91826	
DAU	8	98.009	100.200	99.5100	.86005	
BJ	8	73.65	97.23	90.5988	7.41528	
Kinerja Keuangan	8	42.00%	52.27%	47.8338%	3.55121%	
Valid N (listwise)	8					

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, seluruh variabel penelitian memiliki jumlah data yang sama, yaitu delapan observasi. PAD menunjukkan rentang nilai cukup luas dengan rata-rata 105,11. DAU memiliki variasi

yang rendah, tercermin dari standar deviasi yang kecil (0,86). Belanja Modal juga memiliki penyebaran moderat dengan rata-rata sekitar 90,60. Sementara itu, kinerja keuangan berada pada kisaran 42% hingga 52%, dengan rata-rata 47,83%, menunjukkan stabilitas relatif. Secara keseluruhan, data tiap variabel memiliki variasi yang dapat diterima untuk dianalisis lebih lanjut.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### 1. Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.94935658
Most Extreme Differences	Absolute	.195
	Positive	.195
	Negative	-.185
Test Statistic		.195
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Menurut Gambar diatas, hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini adalah 0,200, yang melebihi ambang 0,05. Karena tingkat signifikansi tersebut lebih tinggi dari 0,05, hal ini menyiratkan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa model regresi linier yang diterapkan telah terdistribusi dengan normal.

##### 2. Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

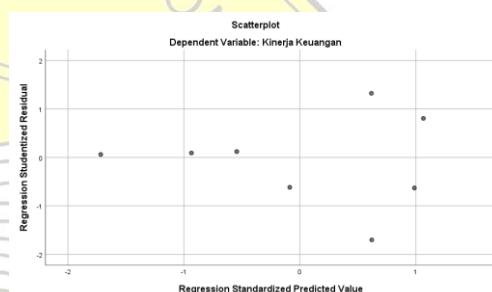
Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF

1	PAD	.742	1.348
	DAU	.738	1.356
	BJ	.711	1.406

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Menurut gambar di atas, Toleransi untuk PAD, DAU, dan Belanja Modal menunjukkan angka yang melebihi 0,10, sedangkan VIF dari semua variabel tetap di bawah 10. Ini menandakan bahwa model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas. Oleh sebab itu, ketiga variabel independen tersebut cocok untuk diterapkan dalam analisis regresi, sebab mereka tidak saling memengaruhi secara ekstrem.

##### 3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Scatterplot

Dari gambar diatas, grafik yang ditampilkan, data points tampak terdistribusi secara tidak teratur, dengan posisi yang bervariasi baik di atas maupun di bawah nilai nol pada sumbu vertikal, tanpa adanya formasi pola tertentu. Dari observasi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tersebut bebas dari heteroskedastisitas, sehingga cocok untuk diterapkan dalam analisis lanjutan.Uji Autokorelasi.

##### 4. Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>				
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.964 <sup>a</sup>	.929	.875	1.25588 %	2.078
a. Predictors: (Constant), BJ, PAD, DAU				
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan				

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, statistik Durbin-Watson (DW) yang didapat adalah 2,078. Angka ini selanjutnya disandingkan dengan batas bawah (dL) dan batas atas (dU) dari tabel Durbin-Watson. Dengan parameter  $\alpha = 0,05$ , jumlah variabel independen  $K = 3$ , serta ukuran sampel  $n = 8$ , nilai yang diperoleh adalah  $dL = 0,367$  dan  $dU = 2,286$ . Mengingat kondisi  $dL \leq DW \leq dU$  terpenuhi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini tidak mengalami autokorelasi positif.

#### Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-93.745	70.128		-1.337	.252
	PAD	.388	.056	1.085	6.989	.002
	DAU	.849	.643	.206	1.320	.257
	BJ	.180	.076	.376	2.372	.077

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Analisis regresi mengungkapkan bahwa PAD memberikan dampak yang bermakna pada performa finansial, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 (yang lebih kecil dari 0,05), sehingga PAD memainkan peran krusial dalam mendorong peningkatan performa finansial. Di sisi lain, DAU dan Belanja Modal menunjukkan nilai signifikansi

masing-masing 0,257 dan 0,077, yang menunjukkan bahwa keduanya tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena angka tersebut melebihi 0,05. Oleh karena itu, hanya PAD yang terbukti memiliki kontribusi substansial dalam model regresi ini.

#### Uji Koefisien Korelasi Product Moment

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Korelasi Product Moment

Correlations					
		PAD	DAU	BJ	Kinerja Keuangan
PAD	Pearson Correlation	1	-.265	-.322	.909**
	Sig. (2-tailed)		.525	.437	.002
	N	8	8	8	8
DAU	Pearson Correlation	-.265	1	-.330	-.206
	Sig. (2-tailed)	.525		.425	.624
	N	8	8	8	8
BJ	Pearson Correlation	-.322	-.330	1	-.041
	Sig. (2-tailed)	.437	.425		.924
	N	8	8	8	8
Kinerja Keuangan	Pearson Correlation	.909*	-.206	-.041	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.624	.924	
	N	8	8	8	8

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil dari analisis korelasi mengungkapkan bahwa PAD menjalin keterkaitan yang sangat kuat serta bermakna dengan performa keuangan, dengan koefisien  $r = 0,909$  dan signifikansi 0,002. Di lain pihak, DAU dan Belanja Modal gagal menunjukkan kaitan yang bermakna terhadap performa keuangan, sebagaimana dibuktikan oleh angka signifikansi masing-masing 0,624 dan 0,924. Tambahan pula, korelasi di antara variabel bebas—PAD, DAU, dan Belanja Modal—dapat dikategorikan sebagai lemah serta tidak bermakna, sehingga tidak mengindikasikan keberadaan isu multikolinearitas di antara variabel-variabel tersebut.

#### Uji Determinasi

Tabel 7 Hasil Uji Determinasi

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964 <sup>a</sup>	.929	.875	1.25588%
a. Predictors: (Constant), BJ, PAD, DAU				
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan				

berdasarkan dalam tabel diatas mengungkapkan bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) mencapai angka 0,875, yang menyatakan bahwa sebanyak 87,5% dari variabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dapat diakibatkan oleh pengaruh bersama Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Belanja Modal (X3). Adapun sisanya 12,5% dipengaruhi oleh elemen-elemen lain yang tidak menjadi bagian dari kajian ini. Oleh karena itu, koefisien determinasi tersebut dikategorikan sebagai sangat tinggi.

#### **Uji Hipotesis**

##### 1. Uji T

Tabel 8 Hasil Uji T

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standarized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-93.745	70.128		1.337	.25
PAD	.388	.056	.1085	.89	.20
DAU	.849	.643	.206	1.37	.25
BJ	.180	.076	.376	2.37	.07

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Hasil Analisis regresi diatas mengungkapkan bahwa PAD memberikan dampak yang bermakna pada performa finansial, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 (yang lebih kecil dari 0,05), sehingga PAD memainkan peran krusial dalam mendorong peningkatan performa finansial. Di sisi lain, DAU dan Belanja Modal menunjukkan nilai signifikansi masing-masing 0,257 dan 0,077, yang menunjukkan bahwa keduanya tidak memberikan pengaruh

yang signifikan karena angka tersebut melebihi 0,05. Oleh karena itu, hanya PAD yang terbukti memiliki kontribusi substansial dalam model regresi ini.

#### 2. Uji F

Tabel 9 Hasil Uji F

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	. Sig	
1 Regressi onal	81.969	3	27.323	17.323	.00	
	6.309	4	1.577			
	88.278	7				

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), BJ, PAD, DAU

Hasil dari uji F mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan bermakna, sebagaimana dibuktikan oleh nilai F yang mencapai 17,323 dengan signifikansi 0,009 (yang lebih kecil dari 0,05). Ini berarti PAD, DAU, dan Belanja Modal bersama-sama memberikan dampak yang signifikan pada performa keuangan. Oleh sebab itu, model regresi ini cocok untuk menginterpretasikan variabel dependen

#### **5. KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan dampak yang cukup besar dan mendukung secara positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam periode 2017 hingga 2024. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum serta Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh yang berarti secara individu terhadap Kinerja Keuangan. Jika dilihat secara bersama-sama, ketiga indikator tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dengan tingkat kemampuan mereka dalam

menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah mencapai 87,5%. Ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel ini masih berperan penting dalam menguraikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Aspek manajemen keuangan ini menekankan betapa krusialnya penguatan strategi fiskal yang lebih merata dan efektif. Secara umum, diperlukan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah lewat kreativitas daerah, perbaikan efisiensi Belanja Modal untuk menunjang Pembangunan yang lestari, serta penanganan anggaran yang terbuka dan bertanggung jawab agar tercapai harmoni antara kemajuan ekonomi wilayah dan kelestarian lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Berliani, K. (2022). *THE EFFECT OF REGIONAL TAXES, REGIONAL LEVIES, GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURES IN REGENCIES/CITIES IN WEST JAVA PROVINCE 2014 – 2021*. 01(01), 23–30.
- Berliani, K., Studi, P., Sekolah, A., Ilmu, T., Indonesia, E., Ekonomi, P., & Kesejahteraan, T. (2016). *PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI*. 15(2), 121–144.
- Daerah, K., Kota, K., & Jawa, P. (2018). *Nareswari Listya Nindita 1*, Sri Rahayu 2 1,2. 2(1), 12–19.
- Estate, R., Sudaryo, Y., Pratiwi, I. Y., Studi, P., Manajemen, M., Tinggi, S., Ekonomi, I., Membangun, I., Perusahaan, L. T., Modal, S., Keuangan, K., & Perusahaan, K. K. (2016). *PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN LIKUIDITAS TERHADAP*. 2(1).
- Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Belanja Modal , dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023*. 7(1). <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., Siwu, H. F. D. J., Pendapatan, P., Daerah, A., Dan, P. A. D., Perimbangan, D., Ilmu, J., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. J. (2021). *KABUPATEN HALMAHERA TENGAH THE EFFECT OF LOCAL REVENUE ( PAD ) AND BALANCING FUNDS ON THE REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE OF CENTRAL HALMAHERA DISTRICT* *Jurnal EMBA Vol. 9 No . 1 Januari 2021*, Hal. 453-461. 9(1), 453–461.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pub. L. No. 8 (2006).
- Pengaruh Pajak Reklame , Pajak Restoran , Pajak Hiburan , dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. 4, 12027–12042.
- ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH , DANA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH*. 8, 1–13.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33 (2004).
- Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, N. A. S. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*.